

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transformasi bisnis global yang dipicu oleh perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan mendorong perusahaan untuk tidak lagi berfokus semata pada kinerja keuangan, tetapi juga pada aspek *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Kinerja *ESG* kini menjadi indikator penting dalam menilai tanggung jawab sosial dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan, serta mencerminkan standar etika dan komitmen keberlanjutan yang semakin diperhatikan oleh investor, regulator, pemerintah dan masyarakat (Wang et al., 2022). *ESG* merupakan kerangka evaluasi yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Penguatan agenda keberlanjutan global telah mendorong pemerintah dan lembaga keuangan untuk menetapkan regulasi dan standar yang mewajibkan integrasi prinsip *ESG* dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan *ESG* menjadi prasyarat penting bagi perusahaan untuk mempertahankan daya saing dan keberlanjutan usaha (Wu et al., 2022).

Peningkatan kinerja *ESG* secara komprehensif dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan transparansi, mengurangi asimetri informasi, serta memperkuat reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan (Li et al., 2024). Selain itu, *ESG* telah menjadi pertimbangan utama bagi investor institusional dalam keputusan investasi berkelanjutan. Pengungkapan risiko lingkungan, sosial,

dan tata kelola yang memadai juga semakin krusial khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di pasar teregulasi (Gutiérrez-Ponce & Wibowo, 2023).

Berbagai laporan lembaga keuangan global menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi prinsip *ESG* cenderung memiliki kinerja jangka panjang yang lebih stabil. Di tingkat internasional, Uni Eropa telah mewajibkan pelaporan *ESG* melalui *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) yang mulai berlaku tahun 2024, dengan ketentuan pelaporan yang komprehensif dan terstruktur mencakup seluruh aspek *ESG* (Pantazi, 2024). Hal ini menegaskan bahwa *ESG* tidak lagi bersifat sukarela, melainkan telah menjadi bagian dari kerangka regulasi yang mengikat.

Di Indonesia, komitmen terhadap *ESG* tercermin dalam berbagai kebijakan nasional, seperti POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Bursa Efek Indonesia pada Januari 2025 juga meluncurkan sistem *ESG Reporting* yang mengadopsi *ASEAN Exchanges Common ESG Metrics* dan selaras dengan POJK Nomor 51/2017 guna meningkatkan transparansi dan kualitas data *ESG* perusahaan tercatat (Heriyanto, 2025). Selain itu, OJK menerbitkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) tahun 2024 sebagai panduan alokasi pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung target *Net Zero Emission* 2060, serta mengeluarkan Panduan *Climate Risk Stress Testing* (CRST) dan POJK No. 14/2023 terkait bursa karbon.

Bagi sektor perbankan, penerapan *ESG* menjadi semakin relevan karena bank diwajibkan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan. *ESG* berfungsi sebagai tolok ukur kepatuhan dan

keseriusan bank dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* serta agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon. Selain itu, bank menghadapi risiko kredit, reputasi, dan operasional apabila pembiayaan diberikan kepada sektor yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, integrasi *ESG* dalam aktivitas perbankan berperan penting dalam pengelolaan risiko iklim dan sosial yang dapat memengaruhi stabilitas portofolio kredit dan kinerja bank secara keseluruhan.

ESG mengacu pada tiga faktor utama dalam mengukur dampak keberlanjutan dan etika dalam pengambilan keputusan investasi. Penyusunan skor *ESG* merupakan salah satu bagian penting dalam mengevaluasi implementasi praktik *ESG* di perusahaan. *IDX* berkomitmen untuk mempromosikan investasi berkelanjutan dan meningkatkan praktik *ESG* di pasar modal Indonesia dengan bekerja sama dengan penyedia skor dalam mengevaluasi skor *ESG* perusahaan yang terdaftar di *IDX*. Saat ini, *IDX* bermitra dengan *Morningstar Sustainalytics* untuk melakukan penilaian *ESG*. *IDX* hanya memasukkan saham yang telah menerima penilaian dari penyedia skor tersebut (*IDX Sustainability*, 2026).

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh *Morningstar Sustainalytics*, terdapat 80 perusahaan yang telah dinilai dengan tingkat skor *ESG* yang bervariasi. Dari jumlah tersebut, hanya 10 perusahaan yang berasal dari sektor perbankan, atau sekitar 12,5 persen dari keseluruhan perusahaan yang telah memperoleh penilaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi sektor perbankan dalam penilaian *ESG* masih relatif terbatas dibandingkan sektor lainnya. Oleh karena itu, pada bagian

berikut disajikan tabel skor *ESG* perusahaan sektor perbankan sebagai dasar analisis lebih lanjut.

Tabel 1.1 *ESG Score* Perusahaan Sektor Perbankan 2025

Nama Bank	Kode Emiten	<i>ESG Score</i>
PT Bank Central Asia Tbk	BBCA	21,44
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI	9,84
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN	28,02
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	BRIS	28,48
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI	21,34
PT Bank Jago Tbk	ARTO	33,59
PT Bank BTPN Syariah Tbk	BTPS	32,52
PT Bank CIMB Niaga Tbk	BNGA	22,96
PT Bank OCBC NISP Tbk	NISP	27,89
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI	19,45

Sumber: *IDX Sustainability* (2026)

Berdasarkan Tabel 1.1, kinerja *ESG* sektor perbankan Indonesia tahun 2025 menunjukkan heterogenitas yang cukup tinggi, dengan rentang nilai *ESG score* yang lebar. Kondisi ini mencerminkan bahwa implementasi prinsip keberlanjutan belum terinternalisasi secara merata di seluruh industri perbankan. Bank-bank dengan *ESG score* relatif tinggi umumnya menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi bisnisnya. Sebaliknya, beberapa bank besar dan bank BUMN justru memiliki *ESG score* yang relatif rendah yang mengindikasikan bahwa skala dan dominasi pasar tidak selalu sejalan dengan kualitas praktik *ESG*. Kompleksitas operasional, eksposur risiko yang luas serta tantangan tata kelola keberlanjutan menjadi faktor yang berpotensi menekan kinerja *ESG*.

Kasus gugatan yang diajukan oleh TuK INDONESIA terhadap Bank Mandiri mencerminkan adanya permasalahan nyata dalam implementasi *ESG*, khususnya pada aspek sosial dan tata kelola di sektor perbankan Indonesia.

Meskipun Bank Mandiri mengklaim sebagai pelopor perbankan berkelanjutan, pembiayaan yang disalurkan kepada PT Astra Agro Lestari dan anak usahanya PT Agro Nusa Abadi diduga berkaitan dengan praktik yang merugikan masyarakat lokal, termasuk konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia (Indonesia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial ESG belum diimplementasikan secara optimal, terutama dalam memastikan bahwa aktivitas pembiayaan tidak berdampak negatif terhadap masyarakat.

Dari sisi *governance*, kasus ini juga mengindikasikan lemahnya prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Ketidakhadiran Bank Mandiri dalam sidang perdana semakin memperkuat persepsi adanya kurangnya komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara klaim keberlanjutan (*ESG disclosure*) dengan praktik nyata (*greenwashing*) yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik dan kredibilitas lembaga keuangan.

Penelitian ini meneliti sektor perbankan karena perbankan berperan strategis sebagai *intermediary* yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi modern juga memperkuat peran ini melalui digitalisasi layanan dan peningkatan efisiensi pembiayaan (Diatmika et al., 2024). Selain berdampak pada perekonomian, sektor perbankan secara tidak langsung turut memengaruhi lingkungan melalui kebijakan pemberian kredit. Keputusan pembiayaan yang diberikan kepada debitur menentukan arah kegiatan usaha yang didukung, sehingga bank memiliki peran

penting dalam mendorong atau membatasi dampak lingkungan melalui praktik pembiayaan yang berkelanjutan.

Perusahaan perbankan harus menganalisa tujuan kredit yang diberikan kepada debitur dan memastikan bahwa kredit yang disalurkan tersebut digunakan untuk tujuan bisnis yang tidak membahayakan lingkungan. Bank harus memiliki kemampuan strategis untuk mempertahankan kualitas pemberian kredit yang berkelanjutan. Perbankan harus memiliki inisiatif *sustainable banking*, sehingga dalam penyaluran kredit bank juga menilai dampaknya terhadap lingkungan budaya dan sosial serta dukungan investor (Adu, 2022).

Menurut Wrespatiningsih & Mahyuni (2022) Perusahaan perbankan dapat berkontribusi dalam pembangunan keberlanjutan dengan menerapkan praktik green banking, di antaranya dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana transaksi serta menggunakan ruang penyimpanan digital untuk menghindari penggunaan kertas yang berlebihan, sehingga limbahnya tidak mengancam lingkungan sekitar. Berbagai permasalahan kerusakan lingkungan beserta faktor penyebab dan konsekuensinya terhadap keberlangsungan hidup manusia, baik pada masa kini maupun masa depan, telah menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian lingkungan (Purnamawati et al., 2018). Prinsip *green banking* merupakan upaya perbankan untuk meningkatkan portofolio ramah lingkungan dan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dalam penyaluran kredit.

Di Indonesia, tren partisipasi perbankan yang mendukung pembangunan berkelanjutan meningkat dalam lima tahun terakhir. Hal ini terpotret dalam

peningkatan penyaluran kredit untuk usaha berwawasan lingkungan (*eco-friendly*) serta usaha mikro kecil, dan menengah setiap tahunnya. Realisasi pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp 1.959 triliun pada 2023, yang rata-ratanya tumbuh 20 % per tahun. Perbankan nasional juga memperkuat komitmen terhadap ekonomi hijau, terlihat dari penyaluran kredit keberlanjutan hingga usaha mikro meskipun porsi kredit hijau masih di bawah 2 % dari total kredit (Irawan, 2025).

Istilah keberlanjutan dalam konteks pembiayaan perbankan merujuk pada kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KKUB) yang terdiri dari dua portofolio kredit, yakni sosial untuk UMKM dan hijau untuk usaha berwawasan lingkungan. Kedua portofolio kredit ini masuk kategori pembiayaan berkelanjutan (*sustainability financing*) karena berdampak positif bagi ekonomi jangka panjang. Tren partisipasi perbankan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan saat ini masih terkonsentrasi pada bank-bank dengan modal besar. Dari 105 bank umum yang tercatat di OJK, hanya empat perbankan yang tergolong KBMI 4 atau kepemilikan modal inti di atas Rp 70 triliun. Berikut merupakan tren pembiayaan empat bank dengan aset terbesar di Indonesia.



Gambar 1.1 Tren Realisasi Penyaluran KKUB 4 Bank Besar di Indonesia
(Sumber: *Sustainability Report* masing-masing Bank, 2025)

Empat bank terbesar di Indonesia secara konsisten menyalurkan kredit Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam lima tahun terakhir dengan tren yang terus meningkat, menunjukkan komitmen perbankan terhadap pembiayaan berkelanjutan. Namun, bank skala kecil dan menengah masih relatif lambat mengalihkan pembiayaan ke kredit berkelanjutan karena pertimbangan biaya, ketidakpastian, dan orientasi pada profitabilitas jangka pendek. Perbedaan ini menegaskan adanya kesenjangan kapasitas dan sumber daya dalam implementasi *ESG* antara bank besar dan bank kecil-menengah (Irawan, 2025).

Laporan *Sustainable Banking Assessment* (SUSBA) ke-7 menegaskan bahwa meskipun integrasi *ESG* di sektor perbankan mulai berkembang, bank masih menghadapi keterbatasan kapasitas dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko utama, khususnya perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, serta masih minimnya dukungan pembiayaan yang berdampak nyata bagi aspek lingkungan dan sosial. Tantangan implementasi *ESG* diperparah oleh kebutuhan modal yang tinggi, ketidakpastian dan asimetri informasi, sehingga praktik keberlanjutan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam strategi perbankan.

Dalam konteks tersebut, *fintech* muncul sebagai faktor strategis yang berpotensi menjembatani kesenjangan antara komitmen dan implementasi *ESG*. Melalui pemanfaatan teknologi digital seperti *big data*, *artificial intelligence*, dan *blockchain*, *fintech* mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengelolaan risiko, serta memfasilitasi pengembangan produk keuangan yang lebih solutif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi *fintech* dalam model bisnis perbankan

membuka peluang signifikan untuk memperkuat kinerja *ESG* dan mendorong praktik keuangan berkelanjutan secara lebih efektif.

Perkembangan *fintech* telah mendorong integrasi mendalam teknologi digital dengan ekonomi riil. Tidak seperti keuangan tradisional, *fintech* didasarkan pada teknologi digital untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya keuangan. *Fintech* mengacu pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan, memodernisasi, atau mengotomatisasi layanan dan produk keuangan. Perkembangan transaksi digital dalam sektor perbankan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Data Bank Indonesia mencatat bahwa hingga Januari 2026 jumlah transaksi digital mencapai 4,79 miliar transaksi atau tumbuh 39,65% secara tahunan (Jalin, 2026). Peningkatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian utama dalam aktivitas perbankan dan berkontribusi pada efisiensi serta pengurangan penggunaan kertas, yang mendukung aspek *environmental*.

Namun demikian, di balik peningkatan tersebut, muncul berbagai fenomena yang berdampak pada kinerja *ESG*, khususnya pada aspek sosial dan *governance*. Dari sisi sosial, maraknya kejahatan digital menjadi isu utama. Data Otoritas Jasa Keuangan melalui Indonesia Anti *Scam Center* (IASC) menunjukkan bahwa hingga November 2025 terdapat 373.129 laporan penipuan digital dengan total kerugian mencapai Rp8,2 triliun (Sayekti, 2025). Bahkan, sejak 2024 tercatat lebih dari 225 ribu laporan dengan kerugian Rp4,6 triliun (Wahyuni, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan transaksi digital belum diimbangi dengan perlindungan nasabah yang memadai.

Selain itu, ancaman terhadap keamanan data juga semakin nyata. Kasus kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 menjadi bukti bahwa sistem keamanan digital perbankan masih rentan terhadap serangan siber (Rohmah & Ribawati, 2025). Tidak hanya itu, kasus pembobolan 1,3 juta akun nasabah bank akibat celah sistem *mobile banking* dengan kerugian mencapai Rp127 miliar juga memperkuat adanya kelemahan dalam perlindungan sistem digital. Kondisi ini mencerminkan permasalahan serius pada aspek *social*, karena berdampak langsung pada keamanan dan kepercayaan nasabah.

Dari aspek *governance*, fenomena yang muncul berkaitan dengan lemahnya manajemen risiko dan pengendalian internal dalam sistem digital. OJK mencatat adanya 2.688 pengaduan terkait *external fraud* sepanjang 2024 - 2025 dengan kasus dominan berupa pengambilalihan akun (Widiastuti, 2025). Selain itu, peningkatan kasus *phishing* yang signifikan mencapai 26.675 laporan hanya dalam satu kuartal menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan mitigasi risiko digital masih belum optimal (Anonim, 2025). Hal ini diperkuat oleh pernyataan OJK bahwa risiko penipuan digital terus meningkat seiring perkembangan teknologi keuangan.

Sebuah riset oleh Latisha & Dirkharehza (2024) menemukan bahwa transformasi digital perbankan dapat optimal dalam pelaksanaannya untuk mengatur implementasi berbasis *ESG* yang membuat adanya kepastian hukum bagi bank digital sehingga transisi menuju *green banking* dapat menyeluruh. Su et al. (2023) menjelaskan transformasi digital memang memiliki dampak positif pada kinerja *ESG* perusahaan. Kemudian Jin & Wu (2024) juga memaparkan transformasi digital menjadi faktor penting yang memengaruhi peningkatan kinerja

ESG perusahaan. Kemudian (Ramadana & Butar-butur, 2026) memaparkan transformasi digital memiliki signifikan positif terhadap kinerja *ESG* Perusahaan. Sebaliknya, Eriandani & Winarno (2023) menemukan digitalisasi tidak dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Transformasi digital berdampak negatif terhadap kinerja lingkungan dan tata kelola, tetapi berdampak positif terhadap kinerja sosial (Khanchel et al., 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, isu perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah menjadi perhatian utama di tingkat global. Berbagai negara merespons tantangan tersebut dengan merumuskan kebijakan serta mengembangkan instrumen keuangan ramah lingkungan guna menekan emisi karbon dan mendorong pembangunan berkelanjutan (Dhayal et al., 2025). Dalam konteks transisi menuju ekonomi rendah karbon, keuangan hijau (*green finance*) menjadi mekanisme strategis yang mendorong pengalokasian dana ke sektor-sektor ramah lingkungan dan berkelanjutan. Melalui instrumen ini, khususnya perbankan diharapkan dapat mengintegrasikan aspek lingkungan dalam keputusan pembiayaan sehingga arus modal tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, keuangan hijau merepresentasikan transformasi sistem keuangan yang diarahkan untuk menjawab tantangan lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan (Zhang & Wei, 2024).

Beberapa studi terkini menunjukkan bahwa implementasi keuangan hijau memiliki pengaruh positif terhadap kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (*ESG*) perusahaan. Misalnya, Liu et al. (2024) menemukan bahwa kebijakan

keuangan hijau di Tiongkok berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan skor *ESG* perusahaan melalui peningkatan inovasi hijau dan akses pembiayaan berkelanjutan. Penelitian lain oleh Zhang & Wei (2024) menegaskan bahwa *green finance experimental zones* mampu meningkatkan performa *ESG* terutama pada dimensi lingkungan dan sosial. Di sisi lain, instrumen pasar seperti *green bonds* juga terbukti memainkan peran penting. Penerbitan obligasi hijau berkorelasi positif dengan pengakuan investor terhadap praktik *ESG* perusahaan, sehingga memperkuat sinyal keberlanjutan di pasar modal. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa keuangan hijau bukan hanya sekadar tren kebijakan, melainkan mekanisme strategis untuk memperbaiki keberlanjutan perusahaan dan memperkuat daya tarik investor.

Namun, meskipun penelitian internasional semakin berkembang, kajian mengenai peran keuangan hijau terhadap kinerja *ESG* di konteks negara berkembang khususnya Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang besar sekaligus tingkat emisi karbon yang signifikan, Indonesia memiliki urgensi tinggi untuk mengintegrasikan keuangan hijau ke dalam sistem keuangannya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman empiris terkait apakah pengungkapan keuangan hijau yang baik berpengaruh terhadap kinerja *ESG* perusahaan perbankan di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyatakan bahwa keuangan hijau di Indonesia telah tumbuh signifikan yakni mencapai Rp 1.452 triliun pada tahun 2024. Namun pembiayaan hijau di Indonesia masih

didominasi oleh Bank-bank besar dalam klasifikasi KBMI 3 dan 4. Hal tersebut dikarenakan meskipun pembiayaan hijau memiliki potensi sangat besar, masih terdapat tantangan struktural dalam membiayai proyek hijau. Proyek-proyek hijau umumnya memiliki kompleksitas risiko yang lebih tinggi serta jangka waktu pengembalian yang lebih panjang dibandingkan proyek konvensional (Abigail, 2025).

Hasil Indeks Investasi Hijau III 2025 yang dirilis oleh *Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF)* menunjukkan adanya peningkatan kinerja *Environmental, Social, and Governance (ESG)* pada 13 bank nasional dan asing. Namun, peningkatan skor ESG tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan praktik pembiayaan di lapangan. Pemantauan empiris justru mengindikasikan adanya praktik *greenwashing* yaitu kondisi ketika komitmen dan pelaporan keberlanjutan bank tidak selaras dengan realisasi pembiayaan yang sesungguhnya (Ayuningtyas, 2025).

Laporan TuK Indonesia memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa bank-bank besar nasional, seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA, masih menyalurkan kredit dalam jumlah signifikan ke sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap deforestasi, seperti industri kelapa sawit serta *pulp* and *paper*. Sejak Perjanjian Paris tahun 2016 hingga 2024, total kredit yang mengalir ke sektor berisiko hutan tersebut mencapai sekitar Rp1.300 triliun. Kondisi ini mencerminkan adanya kontradiksi antara narasi komitmen keuangan hijau yang disampaikan perbankan dengan praktik pembiayaan aktual yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan negatif (Indonesia, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi keuangan hijau di sektor perbankan Indonesia masih menghadapi permasalahan mendasar, terutama terkait konsistensi kebijakan, integrasi risiko lingkungan dalam penilaian kredit, serta efektivitas tata kelola dan pengawasan. Dengan demikian, pengungkapan keuangan hijau di perbankan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen transformasi menuju pembangunan berkelanjutan, melainkan masih berisiko menjadi simbol komitmen normatif tanpa perubahan substantif dalam arah pembiayaan.

Pengungkapan keuangan hijau diyakini memiliki keterkaitan erat dengan kinerja *ESG* perusahaan. Dengan mengakses pembiayaan hijau, perusahaan terdorong untuk menerapkan praktik yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat tata kelola yang transparan. Kinerja *ESG* yang baik tidak hanya meningkatkan reputasi dan daya saing, tetapi juga mampu menarik investor yang semakin mengutamakan prinsip keberlanjutan dalam keputusan investasinya.

Berdasarkan *stakeholder theory*, *fintech* dan pengungkapan hijau mencerminkan upaya perusahaan dalam memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan terkait transparansi, inklusi, dan keberlanjutan. *fintech* meningkatkan efisiensi dan akses layanan keuangan, sedangkan pengungkapan hijau menunjukkan akuntabilitas perusahaan dalam kinerja lingkungan, sehingga keduanya berkontribusi pada peningkatan kinerja *ESG*. Dari perspektif *Resource-Based View (RBV)*, kedua variabel tersebut merupakan kapabilitas strategis yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui efisiensi operasional dan

transparansi keberlanjutan. Sementara itu, *institutional theory* menjelaskan bahwa penerapannya juga didorong oleh tekanan regulasi dan norma terkait digitalisasi serta keuangan berkelanjutan, sehingga memperkuat kinerja *ESG* perusahaan.

Profitabilitas berperan sebagai variabel moderasi karena menentukan kapasitas perusahaan dalam mengoptimalkan *fintech* dan pengungkapan keuangan hijau untuk meningkatkan kinerja *ESG*. Perusahaan yang lebih profitabel memiliki sumber daya lebih memadai untuk mengimplementasikan inovasi digital dan pembiayaan hijau secara efektif, sehingga pengaruhnya terhadap *ESG* menjadi lebih kuat (Akyuni & Oktaryani, 2025). Kinerja keuangan yang baik menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengelola sumber daya secara efektif, sehingga memberikan dukungan finansial yang memadai bagi implementasi inovasi *fintech* dan pembiayaan berkelanjutan (Adiputra et al., 2021). Kondisi tersebut yang pada akhirnya berpotensi memperkuat kinerja *ESG* perusahaan perbankan.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam berinvestasi pada teknologi dan juga lingkungan, sehingga potensi pengaruh *fintech* dan pengungkapan keuangan hijau terhadap kinerja *ESG* dapat diperkuat. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah mungkin tidak mampu memaksimalkan potensi *fintech* dan kebijakan pengungkapan keuangan hijau untuk mendorong kinerja *ESG*. Permasalahan yang terjadi terkait profitabilitas yang diukur dengan *ROA* disajikan pada Tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2 Pergerakan *ROA* Perusahaan Sektor Perbankan Tahun 2025

Klasifikasi	Tahun 2025			
	Agustus	September	Oktober	November
KBMI 1	1,48	1,62	1,48	1,45
KBMI 2	2,03	1,94	1,95	1,89
KBMI 3	1,70	1,61	1,70	1,67
KBMI 4	3,33	3,32	3,31	3,32
Rata-rata	2,14	2,12	2,11	2,08

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2026)

Berdasarkan Tabel 1.2, profitabilitas perbankan yang diukur dengan *ROA* menunjukkan tren pelemahan selama Agustus–November 2025, dari 2,14% menjadi 2,08%, yang mengindikasikan penurunan efisiensi dalam pemanfaatan aset untuk menghasilkan laba. Berdasarkan klasifikasi KBMI, terdapat disparitas yang cukup signifikan, di mana bank KBMI 4 mencatat *ROA* tertinggi meskipun cenderung stagnan dan sedikit menurun. Sementara itu, bank KBMI 1 dan KBMI 3 menunjukkan *ROA* yang lebih rendah dan fluktuatif, mencerminkan keterbatasan bank berskala kecil dan menengah dalam mengelola aset di tengah tekanan biaya dan risiko operasional.

Beberapa penelitian sebelumnya ternyata menemukan bahwa ada kendala yang dialami perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja *ESG*, salah satunya adalah adanya kendala pendanaan (*financial constraint*). Untuk dapat meningkatkan praktik *ESG* perusahaan tentunya memerlukan biaya yang tinggi, dan perusahaan harus berkomitmen untuk mengalokasikan dananya kedalam praktik *ESG*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tan & Zhu (2022) menjelaskan bahwa kendala pendanaan dan biaya secara signifikan mengurangi dorongan intrinsik perusahaan terhadap *ESG*. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan diteliti lebih lanjut motivasi intrinsik perusahaan yang dapat meningkatkan praktik *ESG*

perusahaan, salah satunya adalah profitabilitas. Semakin tinggi *profit* perusahaan, maka perusahaan semakin mampu untuk mengelola sumber dayanya untuk menghasilkan keuntungan, sehingga perusahaan juga semakin termotivasi untuk meningkatkan praktik *ESG*-nya.

Penelitian yang meneliti hubungan antara profitabilitas dan kinerja *ESG* dilakukan oleh Aydoğmuş et al. (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja *ESG* di perusahaan-perusahaan Eropa. Artinya, semakin tinggi profitabilitas, semakin efektif perusahaan dalam menerapkan inisiatif *ESG*. Putri & Mulyantini (2025) juga menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara profitabilitas dan kinerja *ESG* yang berarti bahwa perusahaan dengan *profit* yang lebih tinggi cenderung lebih mampu menerapkan inisiatif keberlanjutan. Oktadewi & Diantini (2025) menemukan bahwa profitabilitas secara signifikan memoderasi hubungan antara *ESG* dan nilai perusahaan.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada integrasi *fintech* dan pengungkapan keuangan hijau dalam satu model konseptual terhadap kinerja *ESG* serta memasukkan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Pendekatan ini memberikan perspektif kontinjensi yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang hanya menguji pengaruh langsung. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur dengan mengaitkan transformasi digital dan *sustainable finance* dalam kerangka *stakeholder theory*, *resource-based view*, dan *institutional theory*. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan memberikan implikasi bagi

manajemen dan regulator dalam merancang strategi digital dan pembiayaan hijau yang efektif untuk meningkatkan kinerja *ESG*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

- 1) Tren partisipasi perbankan di Indonesia yang mendukung pembangunan berkelanjutan meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun tren pembiayaan berkelanjutan secara keseluruhan mengalami peningkatan, saat ini masih banyak bank skala kecil menengah yang belum fokus mengalihkan pembiayaan mereka ke kredit keberlanjutan dengan alasan biaya dan ketidakpastian. Bank kecil dan menengah lebih memprioritaskan profitabilitas jangka pendek sehingga menganggap penerapan *ESG* hanya sebagai beban tambahan.
- 2) Berdasarkan penilaian *Morningstar Sustainalytics*, dari 80 perusahaan yang dinilai hanya 10 perusahaan perbankan (12,5%), dengan kinerja *ESG* yang menunjukkan heterogenitas tinggi. Rentang nilai *ESG* yang lebar mengindikasikan bahwa prinsip keberlanjutan belum terinternalisasi secara merata di sektor perbankan. Bahkan, beberapa bank besar dan BUMN mencatat *ESG score* relatif rendah, menegaskan bahwa skala usaha tidak selalu sejalan dengan kualitas praktik *ESG* akibat kompleksitas operasional dan tantangan tata kelola.

- 3) Hasil Indeks Investasi Hijau III 2025 menunjukkan peningkatan skor *ESG* pada sejumlah bank, namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan praktik pembiayaan aktual, sehingga mengindikasikan adanya *greenwashing*. Temuan TuK Indonesia memperlihatkan bahwa bank-bank besar nasional masih menyalurkan kredit signifikan ke sektor berisiko deforestasi, dengan total pembiayaan sekitar Rp1.300 triliun sejak 2016-2024. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara komitmen *green finance* dan implementasi pembiayaan berkelanjutan di lapangan.
- 4) Profitabilitas sektor perbankan yang diukur dengan *ROA* menunjukkan tren pelemahan selama Agustus - November 2025, ditandai penurunan rata-rata *ROA* dari 2,14% menjadi 2,08% yang mengindikasikan menurunnya efisiensi pemanfaatan aset. Berdasarkan klasifikasi KBMI, terdapat disparitas profitabilitas, di mana bank KBMI 4 mencatat *ROA* tertinggi namun cenderung stagnan, sementara bank KBMI 1 dan KBMI 3 menunjukkan *ROA* lebih rendah dan fluktuatif. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan bank berskala kecil dan menengah dalam mengelola aset secara optimal di tengah tekanan biaya dan risiko operasional.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada kinerja *ESG* dengan mengintegrasikan *fintech* dan pengungkapan keuangan hijau serta menguji peran profitabilitas sebagai variabel moderasi. Pembatasan ini bertujuan agar penelitian dapat mengkaji permasalahan secara lebih spesifik dan mendalam, dengan mempertimbangkan

keterbatasan metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, serta terbatasnya jangka waktu dan ketersediaan data dari masing-masing perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- 1) Apakah *fintech* berpengaruh positif terhadap kinerja *ESG*?
- 2) Apakah pengungkapan keuangan hijau berpengaruh positif terhadap kinerja *ESG*?
- 3) Apakah profitabilitas mampu memperkuat pengaruh *fintech* terhadap kinerja *ESG*?
- 4) Apakah profitabilitas mampu memperkuat pengaruh pengungkapan keuangan hijau terhadap kinerja *ESG*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *fintech* terhadap kinerja *ESG*
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan keuangan hijau terhadap kinerja *ESG*
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *fintech* terhadap kinerja *ESG* dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi

- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan keuangan hijau terhadap kinerja *ESG* dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

- 1) Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan model konseptual terkait kinerja *ESG* dengan landasan teori *stakeholder* dan teori *RBV*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai mekanisme kinerja *ESG* dan mendorong keberlanjutan perusahaan sektor perbankan.

- 2) Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis yakni sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam melaksanakan transaksi digital dan pengungkapan keuangan hijau dalam upaya meningkatkan kinerja keberlanjutan.